

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.  
Hartono, S.H.

**BUKU AJAR**  
**PENGANTAR**  
**HUKUM INDONESIA**





**BUKU AJAR  
PENGANTAR HUKUM  
INDONESIA**



**BUKU AJAR  
PENGANTAR HUKUM  
INDONESIA**

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.  
Hartono, S.H.

**LBH**  **TAKA**  
Lembaga Bantuan Hukum  
**S a m a r i n d a**

Buku Ajar  
Pengantar Hukum Indonesia

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kotijah, Siti  
Hartono

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia / Siti Kotijah, Hartono  
-Ed.1-cet.1-Samarinda: LBH TAKA, 2017  
Vii, 257 hlm, 15 x 23 cm  
ISBN: 978-602-50469-0-2

Hak cipta 2017, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Hartono, S.H.

---

Cetakan ke-1, November 2017

---

Hak Penerbit pada Lembaga Bantuan Hukum TAKA

---

Dicetak di Lingkar Media  
Perum. Gunung Sempu RT.06 Jl. Menur 187 Yogyakarta  
Hp/WA: 0857 1215 8655

---

Lembaga Bantuan Hukum TAKA  
Kantor Pusat :  
Jl. Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Blok B5 No.18,  
Kel. Sambutan, Kec.Sambutan, Samarinda 75115  
No Hp : 081263333354  
E-mail : lbhtaka06@gmail.com

“ Cobalah dulu, baru cerita.  
Pahamilah dulu, baru menjawab.  
Pikirlah dulu, baru berkata.  
Dengarlah dulu, baru beri penilaian.  
Bekerjalah dulu, baru berharap.”  
(Socrates)

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan atas kuasa dan kehendakNya maka Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia ini dapat kami selesaikan untuk menjadi bahan acuan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa fakultas hukum dalam proses belajar mengajar, khususnya sebagai pengantar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif atas pokok hukum di Indonesia.

Tiada gading yang retak, tidak ada sesuatu yang sempurna dalam sebuah penulisan termasuk buku ajar ini. Untuk itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam mempertajam buku ini. Semoga buku ajar ini memberi manfaat dan nilai lebih bagi pemula yang ingin belajar Hukum Indonesia.

Samarinda, 24 September 2017

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	01
A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	01
B. Pengertian Hukum	03
C. Pengertian Tata Hukum Indonesia	13
D. Sejarah Tata Hukum di Indonesia	16
E. Pembinaan Hukum Nasional	20
F. Ringkasan	21
BAB II. SUMBER HUKUM DAN BAHAN HUKUM	23
A. Sumber Hukum	23
B. Klasifikasi Hukum	36
C. Bahan-Bahan Hukum	42
D. Ringkasan	43
BAB III. PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA	44
A. Pengertian Hukum Tata Negara	44
B. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	47
C. Obyek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	51
D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Hukum Lainnya	52
E. Asas-Asas Hukum Tata Negara	54
F. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia	57
G. Sistem Pemerintahan Indonesia	59
H. Ringkasan	62
BAB IV. PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	64
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara	64
B. Perbuatan Administrasi Negara	66
C. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Ilmu Lainnya	71
D. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	75
E. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	77

F. Peradilan Tata Usaha Negara	79
G. Ringkasan	83
BAB V. PENGANTAR HUKUM PIDANA	85
A. Pengertian Hukum Pidana	85
B. Tujuan Hukum Pidana	89
C. Pembagian Hukum Pidana	90
D. Peristiwa Pidana/Tindak Pidana/Delik	93
E. Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik)	94
F. Jenis-Jenis Pidana	95
G. Berlakunya Hukum Pidana	96
H. Macam-Macam Pidana	97
I. Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana	98
J. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	99
K. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	102
L. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam KUHP	102
M. Ringkasan	103
BAB VI. PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA	105
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	105
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	108
C. Sejarah Hukum Acara Pidana	109
D. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	110
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	111
F. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Pidana	115
G. Proses Pelaksanaan Acara Pidana	116
H. Pelaksanaan Dan Pengawasan Keputusan Hakim	118
I. Ringkasan	119
BAB VII. PENGANTAR HUKUM PERDATA	121
A. Pengertian Hukum Perdata	121
B. Sejarah Hukum Perdata	122
C. Sistematika Hukum Perdata	123
D. Ringkasan	131
BAB VIII. PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA	132
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	132
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata	134
C. Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia	134

D. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	138
E. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	141
F. Perbedaan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana	142
G. Cara Mengajukan Gugatan	143
H. Upaya Hukum	145
I. Ringkasan	145
<b>BAB IX. PENGANTAR HUKUM DAGANG</b>	147
A. Pengertian Hukum Dagang	147
B. Sejarah Hukum Dagang	149
C. Sumber Hukum Dagang	150
D. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata	152
E. Ringkasan	153
<b>BAB X. PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN</b>	155
A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	155
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan	157
C. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	159
D. Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan	159
E. Hubungan Kerja	161
F. Perselisihan Hubungan Industrial	164
G. Ringkasan	167
<b>BAB XI. PENGANTAR HUKUM AGRARIA</b>	168
A. Pengertian Hukum Agraria	168
B. Sejarah Hukum Agraria	169
C. Tujuan Hukum Agraria	171
D. Asas-asas Hukum Agraria	171
E. Sumber-Sumber Hukum Agraria	173
F. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria	173
G. Ringkasan	178
<b>BAB XII. PENGANTAR HUKUM PAJAK</b>	179
A. Pengertian Hukum Pajak	179
B. Fungsi Pajak	181
C. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum	182
D. Jenis-Jenis Pajak	182
E. Asas-Asas Pemungutan Pajak	184
F. Sistem Pemungutan Pajak	185

G. Ringkasan	187
BAB XIII. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	188
A. Pengertian Hukum Internasional	188
B. Sumber-Sumber Hukum Internasional	189
C. Subjek-Subjek Hukum Internasional	192
D. Isi Hukum Internasional	193
E. Pengertian Hukum Perdata Internasional	195
F. Peraturan-Peraturan Hukum Perdata Internasional	196
G. Ringkasan	197
BAB XIV. PENGANTAR HUKUM ADAT	198
A. Pengertian Hukum Adat	198
B. Sifat Dan Lingkungan Hukum Adat	200
C. Corak Hukum Adat	202
D. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum)	205
E. Sistem Hukum Adat	206
F. Ringkasan	208
BAB XV. PENGANTAR HUKUM ISLAM	210
A. Pengertian Hukum Islam	210
B. Sumber Hukum Islam	211
C. Ciri-Ciri Hukum Islam	213
D. Ringkasan	215
DAFTAR PUSTAKA	216
BIODATA PENULIS	220
GLOSARIUM	221
INDEX	240

## **DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel: 1 Perbedaan Norma/Kaidah yang Berlaku di Indonesia	07
Tabel: 2 Sumber Hukum Formil Undang-Undang	26
Tabel: 3 Perbedaan Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis	39
Tabel: 4 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara	53
Tabel: 5 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik	53
Tabel: 6 Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan	59
Tabel: 7 Perbandingan Obyek Hukum Pidana Materil dan Formil	91
Tabel: 8 Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	142
Tabel: 9 Perbedaan Pajak Dengan Sumbangan dan Retribusi	184

## DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan: 1 Hubungan Dan Perbedaan Pengantar Hukum Indonesia Dengan Pengantar Ilmu Hukum	03
Bagan: 2 Hukum Dalam Wujud Ketentuan Penguasa	10
Bagan: 3 Hukum Dalam Wujud Para Penegaknya	11
Bagan: 4 Skema <i>Stufen Theory</i> Hans Kelsen	30
Bagan: 5 Perbuatan Administrasi Negara	67
Bagan: 6 Pembagian Hukum Pidana	92
Bagan: 7 Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	102

PENDAHULUAN

**Tujuan Instruksional Khusus**

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Pengantar Hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan Pembinaan hukum nasional.

“ Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum”  
Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

**A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia**

**K**ehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengartikan manusia adalah makhluk sosial atau sering disebut dengan istilah *Zoon Politicon*. Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, berbelanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya.

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi kepentingannya baik secara perorangan maupun kelompok. Atas dorongan hal tersebut maka manusia yang memiliki kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelompok yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat.

Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat tersebut dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau bentrokan antara sesama maka manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia

Bukti Perkara Pidana 98  
 Hukum Acara Pidana 35, 89,  
 90, 99, 115  
 Hukum Pidana Formil 82  
 Hukum Pidana Materil 89  
 Hukum Pidana 35, 46, 63, 70,  
 72, 80, 89, 99  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Pidana 34, 37, 76  
 Hukum Pidana Militer 35  
 Obyek Hukum Pidana Formil  
 82  
 Obyek Hukum Pidana Materil  
 82  
 Pidana 36, 63, 73, 74, 75, 82, 85  
 Pembagian Hukum Pidana 81  
 Pemberantasan Tindak Pidana  
 Korupsi 27  
 Perbandingan Obyek Hukum  
 Pidana Materil 82  
 Pidana Objektif 80  
 Pidana Subjektif 80  
 Proses Pelaksanaan Acara  
 Pidana 96  
 Pieter; Pieter Both 16  
 PIH 3  
 Plato 38  
 PMI 165  
 PNS 61, 62  
 Poenale; Poenale Sanksi 139  
 Poernomo 88  
 Poerwosutjipto 8  
 Pokok; Undang Undang Pokok  
 Agraria 146, 147, 148  
 Politica; Trias Politica 49  
 Politicon; Zoon Politicon 1  
 Politie; Algemeenen Politie  
 Strafreglement 139  
 Politie 62  
 Politierecht 63  
 Pompe 74  
 PPKI 44  
 Primer; Hukum Primer 36  
 Privat; Hukum Privat Eropa 129

Hukum Privat 36, 58  
 Prodjudikoro 87, 113, 121  
 Progresif; Hukum Progresif  
 Satjipto Rahardjo 1  
 Proses; Proses Pelaksanaan Acara  
 Pidana 96  
 Proses Perundang 63  
 Publik; Hukum Internasional  
 Publik 46  
 Hukum Publik 58  
 Lapangan Hukum Publik 36  
 Pudjosewojo; Kusumadi  
 Pudjosewojo 39, 55  
 Purwosutjipto 128  
 Putusan; Pelaksanaan Putusan 82  
 Putusan Hakim Pidana 96  
 Putusan Pengadilan 97

## Q

Qablana 178  
 Qias 177

## R

Ra'yi 177  
 Raad; Hoge Raad 29  
 Raad Van Indie 42  
 Radjab; Dasril Radjab 52  
 Radjiman; Radjiman  
 Widyodiningrat 43  
 Raffles; Thomas Stanfford Raffles  
 155  
 Rahardjo; Hukum Progresif  
 Satjipto Rahardjo 1  
 Rahman 177  
 Raja; Raja Louis XIV 130  
 Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat  
 24, 49, 54  
 Kedaulatan Rakyat 48  
 Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat 49, 50, 53  
 Perwakilan Rakyat Hindia  
 Belanda 41  
 Perwakilan Rakyat 18  
 Ralph 128



Ramulyo; Idris Ramulyo 175  
 Rasulullah; Rasulallah Muhammad  
 176  
     Sunnah Rasulallah Saw 175  
 Ratu; Ratu Kerajaan Belanda 41  
 Realea; Statuta Realea 167  
 Rechshof; Hoge Rechshof 42  
 Recht; Brugerlijk Recht 7  
 Rechterlijk; Rechterlijk Organisatie  
 18  
 Rechtsglement 120  
 Rechtspraak 62  
 Rechtsreglement 116, 117, 118  
 Rechtsvordering; Burgerlijk  
 Rechtsvordering 18, 117  
 Rechtswetsnschap 8  
 Rechtvordering; Burgerlijke  
 Rechtvordering 116  
 Regelaarsrecht 63  
 Regeling 62  
 Regenschapsgerecht 19  
 Regering Verardening 41  
 Regering 41  
 Regering; Regering Verardening 41  
 Reglemen Indonesia Baru 119  
 Reglemen; Reglemen Indonesia  
 Baru 119  
 Reglement; Herziene Inlandsch  
 Reglement 116, 118, 119, 120  
     Inlandsch Reglement 117, 119  
     Reglement 18, 116, 117, 120  
 Reidentie; Reidentie Gerecht 116  
 Rekenkamer; Algemene  
 Rekenkamer 42  
 R Emmelink; Jan R Emmelink 79  
 Residentie; Residentie Gerecht 116  
 Ridwan 7, 170  
 Robert 175  
 Rochmat; Rochmat Soemitro 156  
 Rochussen; Gubernur Jenderal Jan  
 Jacob Rochussen 116  
 Romawi; Hukum Romawi 130  
 Romeyn 62, 63

Rouchussen; Gubernur Jendral  
 Rouchussen 117  
 Rumusan; Rumusan Scholten 39

**S**

Saiko 19  
 Salim; Haji Agus Salim 43  
 Samendo 173  
 Sanksi; Poenale Sanksi 139  
 Satjipto; Hukum Progresif Satjipto  
 Rahardjo 1  
 Saw; Nabi Muhammad Saw 176,  
 177  
     Rasulullah Saw 176, 178  
     Sunnah Rasulallah Saw 175  
 Scholten; Rumusan Scholten 39  
 Schopenhauer 113  
 Seirei; Osamu Seirei 43  
 Sejarah; Sejarah Singkat  
 Rechtsreglement 117  
     Sejarah Tata Hukum Indonesia  
 15  
     Sejarah Tata Hukum 14  
 Selecta; Capita Selecta  
 Perbandingan Hukum 7  
 Serikat; Amerika Serikat 56  
     Serikat Buruh 144  
     Serikat Pekerja 144  
 Seto 166  
 Shahabi 178  
 Shaw; Bernard Shaw 87  
 Simons 74, 83  
 Simorangkir 8  
 Sipil; Kitab Undang Undang  
 Hukum Sipil Belanda 102  
     Kitab Undang Undang Hukum  
 Sipil 102  
     Pegawai Catatan Sipil 109  
 Sirei; Peraturan Osamu Sirei 18  
 Sistem; Ciri Ciri Sistem  
 Pemerintahan 52  
     Sistem Pemerintahan 45  
     Sistem Pendelegasian  
 Kekuasaan Negara 45

Sistem Pendidikan Nasional 26  
 Sistematika; Sistematika Hukum  
 Perdata 103  
     Sistematika 76, 131  
 Siti; Siti Soetami 166, 173, 174  
 Situmorang 57, 64  
 Smeets 156  
 Socrates 101  
 Soebekti 145, 153  
 Soedjono; Soedjono  
 Dirdjosisworo 10  
 Soekanto; Soerjono Soekanto 36  
 Soekarno 43, 44  
 Soemahadidjaja; Soeparman  
 Soemahadidjaja 156  
 Soemitro; Rochmat Soemitro 156  
 Soepomo 136, 170  
 Soerjono; Soerjono Soekanto 36  
 Soerojo; Soerojo Wignjodipoero  
 174  
 Soetami 128  
     Siti Soetami 166, 173, 174  
 Soetikno 136  
 Staats 38  
 Staatsblad; Agrarische Wet  
 Staatsblad 147  
 Staatsregeling; Indische  
 Staatsregeling 41  
 Stamford; Thomas Stamford  
 Raffles 16, 155  
 Starke 162, 168  
 Statuta; Statuta Mixta 168  
     Statuta Personalia 167  
     Statuta Realea 167  
     Statuta Van Batavia 16  
 Statute 24, 31, 65  
 Statuten; Nieuwe Bataviase  
 Statuten 16  
 Stb 117, 132, 139  
 Strafrechtspleging 63  
 Strafreglement; Algemeenen Politie  
 Strafreglement 139  
 Subardjo; Achmad Subardjo 43  
 Subekti 101

Sudarsono 89  
 Sudarto 79  
 Sudikno; Sudikno Mertokusumo 3,  
 22, 27, 112  
     Sudikno 101  
 Sumber; Sumber Hukum Acara  
 Perdata 120  
     Sumber Hukum Administrasi  
 Negara 65  
     Sumber Hukum Dagang 131  
     Sumber Hukum Formil  
 Undang Undang 25  
     Sumber Hukum Internasional  
 162  
     Sumber Hukum  
 Ketenagakerjaan 139  
     Sumber Hukum 22  
 Sun; Sun Tzu 161  
 Sunaryati; Sunaryati Hartono 7,  
 166  
 Sunnah; Sunnah Nabi Muhammad  
 175  
     Sunnah Rasulullah Saw 175  
 Surat; Surat Order 132  
     Surat Presiden 51  
     Surat Wesel 132  
 Syahrani 136  
 Syarifuddin; Amir Syarifuddin 177

## T

Tata; Acara Peradilan Tata Usaha  
 Negara 32  
     Hukum Tata Negara 46  
     Asas Hukum Tata Negara 48  
     Azas Hukum Tata Negara 48  
     Hukum Tata Negara Indonesia  
 50  
     Hukum Tata Negara 46  
     Hukum Tata Negara 35, 36, 38,  
 39, 40, 45, 46, 47, 55, 62  
     Hukum Tata Negara 46, 47  
     Hukum Tata Usaha Negara 36  
     Keputusan Tata Usaha Negara  
 47

Pejabat Tata Usaha Negara 47  
 Peradilan Tata Usaha Negara  
 121  
 Sejarah Tata Hukum Indonesia  
 15  
 Sejarah Tata Hukum 14  
 Tata Hukum Indonesia 12, 13,  
 14, 21  
 Tata Negara 38, 39, 40, 46, 47,  
 62, 63  
 Teritorial; Tipe Genealogis  
 Teritorial 174  
 Tipe Teritorial 173  
 Teritorialitas; Asas Teritorialitas 84  
 Tertier; Hukum Tertier 37  
 Tertulis; Hukum Tertulis 33  
 Hukum Tidak Tertulis 33  
 Testamenter 105  
 The Java Benevolent Institution  
 138  
 Thomas; Thomas Stamford  
 Raffles 16, 155  
 Tiena; Yulies Tiena Masriani 25,  
 81, 159  
 Tillich; Paul Tillich Filsuf Amerika  
 155  
 Tipe; Tipe Genealogis Teritorial  
 174  
 Tipe Genealogis 173  
 Tipe Teritorial 173  
 Tjitrosoedibjo 145  
 Tjokrosuyoso; Abikusno  
 Tjokrosuyoso 43  
 Traktat; Traktat Warsawa 168  
 Traktat Kolektif 29  
 Traktat Multilateral 29  
 Traktat Terbuka 29  
 Treaty 29  
 Trias; Trias Politica 49  
 Tzu; Sun Tzu 161

**U**  
 Uma 174

256

Undang Undang; Didalam Kitab  
 Undang Undang Hukum Pidana  
 84  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Dagang 18, 119, 131  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Perdata 119, 129  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Pidana 37, 76  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Sipil Belanda 102  
 Kitab Undang Undang Hukum  
 Sipil 102  
 Komisi Undang Undang 17  
 Pembukaan Undang Undang  
 Dasar 37, 44, 52  
 Rancangan Undang Undang  
 Dasar 44  
 Undang Undang Pokok Agraria  
 146  
 Undang Undang Darurat 120  
 Undang Undang Dasar Negara  
 Republik Indonesia 44, 139  
 Undang Undang Dasar 19, 27,  
 37, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 155  
 Undang Undang Hukum  
 Dagang 130, 132  
 Undang Undang Hukum  
 Perdata 18, 131  
 Undang Undang Kepolisian  
 Negara Republik Indonesia 24  
 Undang Undang  
 Ketenagakerjaan 26  
 Undang Undang KUHAP 93  
 Undang Undang Panglima Bala  
 118  
 Undang Undang Pokok Agraria  
 146, 147, 148  
 Ushul; Ushul Fiqh 176, 177, 178  
 Utrecht 7, 23, 57, 63, 65

**V**  
 Van; Algemene Maatregedling Van  
 Bestuur 41

Raad Van Indie 42  
Statuta Van Batavia 16  
Van Apeldoorn 9, 39  
Van Bemmelen 79, 88  
Van Vollenhoven 172  
Verardening; Regering  
Verardening 41  
Vereenigde; Vereenigde Oost  
Indische Compagnie 16  
Verklaring; Algemene Domein  
Verklaring 147  
    Domein Verklaring 147  
Veror; Algemene Veror Deningen  
41  
    Local Veror Deningen 41  
Verstek 125  
Verzet 125  
Victor 57, 64  
VOC 16  
Volksraad 18, 41  
Vollenhoven 39  
Vollenhoven; Van Vollenhoven  
172  
Vollmar 102  
Voogdij 105

**W**  
Wahid; Abdul Wahid 176  
    Wahid Hasjim 43  
Wet; Agrarische Wet Staatsblad  
147  
Wetboek; Burgerlijk Wetboek 17,  
18, 102, 103, 131  
Wetboek; Burgerlijke Wetboek  
103, 109, 111  
Wetgeving 18, 167  
Wichers 116  
Widyodiningrat; Radjiman  
Widyodiningrat 43  
Wignjodipoero; Soerojo  
Wignjodipoero 174  
Willem; Hendrik Willem Daendels  
138  
Wirjono 83, 87, 113, 121

WvK 18, 103

**Y**

Yahya; Yahya Harapan 90  
Yamin; Mohammad Yamin 43  
Yayasan; Yayasan Masyarakat  
Indonesia Baru 46, 47, 53, 77, 82,  
115  
Yudikatif; Badan Yudikatif 50  
    Kekuasaan Yudikatif 50  
Yudisial; Komisi Yudisial 50  
Yulies; Yulies Tiena Masriani 2,4,  
25, 81, 159  
Yulkarnain; Yulkarnain Harahab  
176  
Yurisprudensi; Jurisprudensi  
Belanda 29  
    Jurisprudensi 28, 29, 31, 37,  
66, 131, 139

**Z**

Zaeni 162, 176  
Zaeni; Zaeni Asyhadie 4, 33  
Zainal; Zainal Asikin 12, 13  
Zainuddin; Zainuddin Ali 46, 47,  
53, 77, 82, 115  
Zoon; Zoon Politicon

# **BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA**

PENGANTAR HUKUM INDONESIA sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah pengantar, maka buku ini juga dapat menjadi bacaan bagi para peminat hukum jika ingin mempelajari hukum secara lebih mendasar. Buku ini terdiri dari 15 bab yang isinya menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari:

- Bab 1   Pendahuluan
- Bab 2   Sumber hukum dan bahan hukum
- Bab 3   Pengantar Hukum Tata Negara
- Bab 4   Pengantar Hukum Administrasi Negara
- Bab 5   Pengantar Hukum Pidana
- Bab 6   Pengantar Hukum Acara Pidana
- Bab 7   Pengantar Hukum Perdata
- Bab 8   Pengantar Hukum Acara Perdata
- Bab 9   Pengantar Hukum Dagang
- Bab 10  Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
- Bab 11  Pengantar Hukum Agraria
- Bab 12  Pengantar Hukum Pajak
- Bab 13  Pengantar Hukum Internasional & Perdata Internasional
- Bab 14  Pengantar Hukum Adat
- Bab 15  Pengantar Hukum Islam

  
**TAKA Press**  
SAMARINDA  
Hp.08126333354  
E-mail. lbhtaka06@gmail.com

